

APARATUR SIPIL NEGARA – TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

2022

PERBUP. PASURUAN NO. 71, BD 2022/NO.71, 19 HLM.

PERATURAN BUPATI PASURUAN NO. 71 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran huruf D angka 2 poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERMENPANRB No. 34 Tahun 2011; PERMENPANRB No. 39 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 41 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 17 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2021; KEPMENDAGRI No. 900-4700 Tahun 2020; PERDAKab. Pas No. 5 Tahun 2007; PERDAKab. Pas No. 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDAKab. Pas No. 8 Tahun 2021; PERBUP No. 47 Tahun 2017; PERBUP No. 29 Tahun 2021.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kriteria Pemberian TPP ASN, Dasar Pemberian TPP ASN, Perhitungan TPP ASN, dan Pelaksanaan TPP ASN, dimana perumusan, verifikasi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TPP ASN dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPP ASN yang susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksanaan TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Selain itu di dalam Peraturan Bupati ini juga diatur tentang Penundaan Pembayaran TPP ASN, dimana setiap ASN mempunyai kewajiban melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi LHKPN ke KPK.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Maret 2022.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 dinyatakan masih berlaku sampai dengan telah dibayarkannya TPP ASN bulan Desember 2021.